



**KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR BANDANG DI MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Dandi Darmadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

dandi.darmadi.adneg@upnjatim.ac.id

Article Info

Article history:

Received 7 November 2020

Accepted 15 Februari 2021

Published 1 April 2021

Keyword:

*Komunikasi Pemerintah,
Penanggulangan
Bencana, Banjir
Masamba.*

Abstract

The purpose of this study was to describe the communication process of the North Luwu Regency Government, South Sulawesi Province in handling banjir bandang disasters in Masamba. This research method uses a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that the central government's efforts in disaster management focus on handling refugees and restoring housing and public facilities. However, in government communication that occurred in the Masamba flash flood, North Luwu Regency, South Sulawesi Province, the central government was less communicative, causing several problems such as the utilization of volunteers and the distribution of logistics was uneven and less focused. This is evidenced by the rejection by the central government through the Minister of Human Development and Culture regarding the construction of temporary shelters initiated by the Indonesian National Armed Forces (TNI) from the Hasanuddin Military Command not utilized even though the construction has been completed. Finally, the Regent of North Luwu with a humanistic approach was able to resolve the problem between the community and the central government.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses komunikasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Masamba. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah pusat dalam penanganan bencana berfokus pada penanganan para pengungsi, pemulihan perumahan penduduk serta fasilitas umum. Akan tetapi dalam komunikasi pemerintahan yang terjadi di bencana banjir bandang Masamba, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah pusat kurang komunikatif, sehingga menyebabkan beberapa permasalahan seperti pendayagunaan relawan dan distribusi logistik tidak merata dan kurang terarah. Hal ini terbukti dengan adanya penolakan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang pembangunan hunian sementara yang diinisiasi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodam Hasanuddin tidak dimanfaatkan padahal pembangunan telah selesai. Akhirnya, Bupati Luwu Utara dengan pendekatan humanistik mampu menyelesaikan masalah antara masyarakat dan pemerintah Pusat.

Copyright © 2021 Jurnal Ilmu Komunikasi. All rights reserved.

Editorial Office:

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Email: jurnalilkom@uinsby.ac.id

Pendahuluan

Keberadaan sebuah negara pada suatu wilayah diatas bumi sangat menentukan keuntungan serta kerugian yang akan didapatkan, negara memiliki letak geografis yang kaya akan sumber daya alam memang menjadi sebuah benefit tersendiri untuk mengeruk pendapatan yang besar demi kesejahteraan masyarakatnya¹. Indonesia menjadi negara yang bisa dikatakan memiliki benefit tersebut, tidak hanya kekayaan biotik seperti hewan dan tumbuhan tapi juga abiotik seperti minyak bumi, gas alam, emas dan batu bara, berbagai kekayaan sumber daya alam tersebut sangat dipengaruhi oleh letak geografis tentunya².

Seperti mata uang yang memiliki dua sisi, dibalik berlimpahnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, letak geografis Indonesia juga yang berada pada cincin api pasifik dan pertemuan empat lempeng benua yaitu Asia, Australia, Pasifik dan Hindia. Cincin Api Pasifik merupakan daerah yang

memiliki banyak sesar atau zona rekahan yang memanjang sekitar 40 ribu kilometer mulai dari Chile, Jepang, dan kemudian berhenti di Asia Tenggara^{3,4}.

Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) Indonesia sangat Potensial terhadap Bencana mulai dari gempa bumi hingga tsunami, untuk itu upaya penanggulangan bencana baik itu pra bencana ataupun pasca bencana diharapkan mampu meminimalisir kejadian dan dampak yang ditimbulkan⁵. Potensi Bencana pada suatu daerah di Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya melakukan pencegahan, mitigasi dan peringatan dini sehingga potensi bencana dapat diminimalisir, begitupun pada siklus pasca bencana, upaya penanggulangan harus dimaksimalkan pemerintah pusat dan daerah agar proses rehabilitasi dapat berlangsung cepat dan tepat⁶.

¹ Hari Kaskoyo, Abrar Juhar Mohammed, and Makoto Inoue, "Impact of Community Forest Program in Protection Forest on Livelihood Outcomes: A Case Study of Lampung Province, Indonesia," *Journal of Sustainable Forestry* 36, no. 3 (April 3, 2017): 253, <https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/impact-of-community-forest-program-in-protection-forest-on-liveli>.

² Rustinsyah Rustinsyah, Ratna Azis Prasetyo, and Muhammad Adib, "Social Capital for Flood Disaster Management: Case Study of Flooding in a Village of Bengawan Solo Riverbank, Tuban, East Java Province," *International Journal of Disaster Risk Reduction* 52, no. November 2020 (2021): 3, <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101963>.

³ Agung Nugroho, "Pengembangan Model Pembelajaran Mitigasi Bencana Gunung Meletus Di Sekolah Dasar Di Lereng Gunung Slamet,"

Jurnal Pengabdian Masyarakat E-ISSN 1, no. 2 (2018): 135,

<https://doi.org/10.36341/jpm.v1i2.413>.

⁴ Lukman Arif, "Mitigasi Bencana Gempa Di Kota Surabaya (Kajian Tentang Upaya Antisipatif Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mengurangi Resiko Bencana)," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 1 (2020): 95, <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.2048>.

⁵ Anggun Dwi Panorama, Nala Nourma Nastiti, and Fika Aulia Anfasa, "Kerja Sama Pengurangan Risiko Bencana Indonesia Australia 2016-2018," *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (Februari 2021): 228, <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.290>.

⁶ Turniningtyas Ayu Rachmawati, "Comparison Studies on Integrating of Disaster Risk Reduction (DRR) in Spatial Planning Systems in Indonesia, Japan, and European Countries," *Penanggulangan bencana* 4-1, no. Perubahan iklim

Bencana alam berasal dari kombinasi dua faktor: (a) fenomena alam yang mampu melepaskan proses yang menyebabkan kerusakan fisik dan hilangnya nyawa manusia dan modal, dan (b) kerentanan individu dan pemukiman manusia. Peristiwa ini mengganggu kondisi kehidupan masyarakat dan individu serta kegiatan ekonomi negara. Sementara beberapa berasal dari fenomena kekerasan atau tak terduga seperti gempa bumi, yang lain seperti kekeringan lambat berkembang atau berkembang tetapi masih berdampak negatif pada masyarakat dan ekonomi dan, tergantung pada intensitas dan durasinya, pada akhirnya dapat mempengaruhi persediaan makanan atau layanan penting.

Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 2 yang mengatur prinsip penanggulangan bencana mengharuskan adanya kordinasi, keterpaduan dan kemitraan, karena persoalan bencana alam tidak hanya memerlukan penyelesaian pada satu aspek saja, namun berbagai aspek dimungkinkan terlibat baik itu sosial, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur.

Komunikasi pemerintahan yang berlangsung baik antara instansi terkait maupun dengan masyarakat harus terlaksana secara cermat dan cerdas agar efektif tidak menimbulkan kebijakan yang tumpang tindih⁷. Terlebih lagi dalam pasal 26 UU 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tersebut

menyatakan salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Kesalahan yang terjadi dalam komunikasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya akan menyebabkan kesalahpahaman masyarakat dalam menerima informasi yang dimaksudkan tapi juga akan menyebabkan berbagai kebijakan antara instansi baik antara Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) pada lingkup pemerintah daerah, juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat yang turut berkontribusi dalam penanggulangan bencana.

Berjalan baiknya komunikasi pemerintahan akan menjadi akses cepat terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Untuk itu komunikasi dilakukan tidak boleh berlandas pada egoisme pemerintah tapi harus memikirkan kepentingan masyarakat. Esensi komunikasi pemerintahan adalah untuk menjamin berfungsinya pemerintahan melalui keterampilan berkomunikasi, mengaitkan kepentingan masyarakat dan mencapai tingkat kesejahteraan yang setinggi-tingginya tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak⁸.

Fenomena banjir bandang Masamba di Kabupaten Luwu Utara menjadi refleksi terhadap diperlukannya komunikasi pemerintahan yang cermat baik secara horizontal dan vertical, karena sekali lagi,

(2013): 16, internal-pdf://0.217.117.156/DRR & NELAYAN.pdf.

⁷ Fitriana Utami Dewi, "Urgensi Komunikasi Cerdas Dalam Birokrasi Publik," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (April 2011): 111,

<http://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/JIK/article/view/100>.

⁸ Erlina Hasan, *Komunikasi Pemerintahan* (Jakarta: Refika Aditama, 2010). 21.

penanggulangan pasca bencana tidak hanya melibatkan satu elemen saja namun seluruh elemen baik pada lingkup pemerintahan ataupun lembaga non-pemerintah. Rendahnya komunikasi dan koordinasi dalam penanggulangan bencana masamba membuat timbulnya berbagai masalah mulai dari soal relawan atau Sumber Daya Manusia, distribusi logistik, dan kebijakan pemerintah yang saling mengeliminasi, hingga akhirnya muncul berbagai aksi protes massa dari beberapa kelompok masyarakat dan menuai kericuhan.

Komunikasi pemerintah adalah sumber kehidupan yang penting dan elemen strategis dalam pemberian layanan. Kemampuan pemerintah untuk memberikan komunikasi dan interaksi yang transparan, produktif, dan berinteraksi di semua tingkatan secara optimal adalah kunci keberhasilan suatu bangsa di masa depan. Saat kita hidup di era perubahan yang cepat dan kompleksitas yang besar, tantangan yang dihadapi masyarakat, komunitas dan organisasi yang kompleks dan sulit, dan ada kebutuhan umum untuk kepemimpinan dalam komunikasi dari pemerintah. Komunikasi pemerintah memiliki peran penting dalam memanfaatkan niat baik untuk tujuan produktif; dalam membantu membentuk suasana nasional dan pembangunan bangsa.

Begitupula yang terjadi saat masa pemulihan, Pemulihan pada intinya adalah kemitraan antara masyarakat yang terkena

dampak, masyarakat luas, pemerintah, organisasi bantuan dan sektor swasta.⁹ Dengan demikian, pemulihan yang sukses dibangun di atas komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan utama. Komunikasi yang baik juga diperlukan untuk mengelola harapan masyarakat tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah; siapa yang bertanggung jawab di lingkungan pemerintahan untuk memimpin upaya pemulihan; dan apa yang dapat diharapkan masyarakat dalam hal bantuan pemulihan.

Bencana terjadi secara tak terduga, dengan tingkat keparahan yang berbeda, menimbulkan tantangan besar bagi pertukaran informasi dan koordinasi yang efektif. Dalam bencana, dapat menghancurkan beberapa aspek kehidupan manusia, mata pencaharian hancur dan orang-orang terlantar, dengan banyak yang tidak dapat kembali ke kehidupan normal sebelum bencana—situasi yang menimbulkan tantangan sosial-psikologis yang besar bagi para korban. Dampaknya tidak hanya bagi korban, keluarga korban, dan teman. Sifat kolosal dari bencana ini telah memunculkan kesadaran bahwa komunikasi bencana dan strategi manajemen perlu lebih terpadu dan efektif.¹⁰

Strategi-strategi ini akan sangat membantu dalam pengelolaan kerentanan, dan membantu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan dan sistem sosial. Dalam konteks seperti itu, keputusan yang dibuat melalui dasar etika

⁹ Lisa Robert, *Communication during Disaster Recovery, Disaster Recovery Guidance Series* (Washington DC: The World Bank, 2020), 9.

¹⁰ Barbara Reynolds and Matthew Seeger, *Crisis and Emergency Risk Communication*, 2014th ed. (Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, 2014), 11.

mungkin memiliki kesan penting dan bertahan lama pada komunitas yang dilayani. Pengelolaan informasi di antara berbagai pemangku kepentingan dalam bencana alam dan yang disebabkan oleh manusia merupakan hal mendasar bagi mitigasi dan operasi bantuan bencana yang efektif. Proses komunikasi selama dan segera setelah bencana merupakan bagian penting dari respon dan pemulihan, karena menghubungkan korban bencana dengan responden pertama, sistem pendukung, dan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, sistem komunikasi yang dapat diandalkan dan dapat diakses sangat penting untuk ketahanan masyarakat.¹¹

Tujuan dari manajemen risiko bencana adalah untuk menempatkan langkah-langkah awal untuk mencegah efek negatif dan melanjutkan secara efektif pada tahap pemulihan pascabencana dengan tindakan mitigasi yang mengurangi bahaya di masa depan. Tidak ada hubungan langsung antara fenomena alam dan terjadinya bencana. Yang pertama menjadi bahaya bencana jika suatu masyarakat rentan terhadap potensi kerusakannya. Banjir, misalnya, adalah bahaya alam ketika suatu masyarakat memiliki kecenderungan untuk menderita kerugian dan kerusakan sosial dan ekonomi dari mereka.

Masyarakat dalam fase pemulihan ingin mengakses informasi praktis tentang apa yang ingin dilakukan pemerintah serta apa tanggapannya terkait tantangan jangka

panjang mereka dan bagaimana beradaptasi dengan situasi baru. Mereka menginginkan informasi yang akan membantu mereka dalam membuat rencana dan mengambil keputusan tentang masa depan mereka, termasuk informasi yang jelas dan ringkas dari pemerintah dan lembaga bantuan tentang rencana pemulihan dan kesiapsiagaan. Komunikasi yang efektif memberdayakan masyarakat yang terkena bencana maupun yang tidak terkena dampak, membantu meningkatkan kohesi sosial, dan bertindak sebagai bentuk pengembangan masyarakat yang berharga.

Kajian Pustaka

Pandangan esensi komunikasi pemerintah adalah politisi eksekutif dan pejabat public melayani tujuan, peran, dan kepentingan politik, yang berkaitan dengan bagaimana kepala lembaga berkomunikasi, dimana harus dibentuk dan disajikan berdasarkan persetujuan tidak langsung atau langsung dari rakyat¹². Sedangkan prinsip-prinsip dasar komunikasi pemerintahan menjelaskan bahwa (1) Pekerjaan pemerintah adalah kegiatan publik, (2) Pusat Layanan Komunikasi harus diberi wewenang untuk melakukan kegiatan publik tersebut, (3) Politisi adalah komunikator utama komunikasi pemerintah, (4) Setiap orang di pemerintahan adalah komunikator, (5) Komunikasi pemerintah harus didasarkan pada strategi dan program komunikasi

¹¹ Laura N. Medford-Davis and G. Bobby Kapur, "Preparing for Effective Communications during Disasters: Lessons from a World Health Organization Quality Improvement Project," *International Journal of Emergency Medicine* 7, no. 1 (March 2014): 2, DOI:10.1186/1865-1380-7-15.

¹² María José Canel and Karen Sanders, "Government Communication: An Emerging Field in Political Communication Research," in *The SAGE Handbook of Political Communication* (London: SAGE Publications Ltd, 2012), 88.

terpadu, (6) Struktur komunikasi tidak mencerminkan politik, (7) Komunikasi lebih dari sekedar sarana, (8) Bentuk komunikasi yang paling efektif adalah pertukaran langsung dan pertukaran pendapat dengan public, (9) Anda harus memahami lingkungan komunikasi saat mengerjakan kampanye dan program, (10) Kampanye komunikasi paling efektif ketika bekerja dengan pihak lain di luar pemerintah¹³.

Salah satu aspek penting dari komunikasi adalah konsep mengurangi ketidakpastian¹⁴. Komunikasi itu sendiri muncul dari kebutuhan untuk bertindak secara efektif untuk mengurangi ketidakpastian dan melindungi atau memperkuat mereka yang penting bagi saya dalam interaksi individu atau kelompok. Pencegahan bencana membutuhkan informasi yang akurat dari organisasi publik dan swasta yang menangani korban bencana.

Pada saat terjadi bencana alam seperti banjir, badai, angin topan, tsunami, kebakaran dll. mode komunikasi yang biasa seperti telepon, ponsel dll mungkin tidak berfungsi atau mungkin hilang dalam bencana. Masyarakat luas harus dilindungi dengan baik dan perlindungan yang diberikan oleh polisi atau pasukan penanggulangan bencana harus instan dan segera. Dengan demikian kru penanggulangan bencana harus terlatih dengan baik dan dilengkapi dengan

peralatan terbaik yang dapat membantu untuk mengkomunikasikan kondisi mereka dan status bencana di wilayah tempat mereka bekerja.

Membangun komunikasi tentu tidaklah sederhana karena melibatkan berbagai komponen yang berbeda-beda, terdapat 5 landasan utama dalam membangun komunikasi bencana yang efektif yaitu, (1) Memahami orientasi pelanggan, terutama dalam hal ini informasi, komunitas, dan relawan yang dibutuhkan pelanggan¹⁵. Harus ada mekanisme transmisi untuk memastikan bahwa informasi ditransmisikan secara akurat dan lengkap, (2) Komitmen Kepemimpinan Pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat harus berkomitmen untuk berkomunikasi secara efektif dan berpartisipasi aktif dalam proses komunikasi, (3) Kesadaran situasi dan komunikasi yang efektif didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi bencana yang terkendali. Prinsip-prinsip komunikasi yang efektif seperti transparansi dan akuntabilitas sangat penting, (4) Kemitraan dengan media seperti media, televisi, surat kabar dan radio merupakan media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi

¹³ Joel Netshitenzhe, *The Government Communicators' Handbook* (South Africa: Government Communications and Information System, 2014). 41.

¹⁴ Frank Dance, "The 'Concept' of Communication," *Journal of Communication* 20, no. 2 (2006), 207.

¹⁵ G.D. Haddow and Kim S. Haddow, *Disaster Communication in A Changing Media World* (United Kingdom: Butterworth-Heinemann, 2008), 21.

yang akurat kepada publik.^{16,17,18} Bekerja dengan media berarti bekerja untuk memperoleh informasi dan memahami kebutuhan media dengan tim yang mampu mensosialisasikannya kepada publik.

Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2008 pasal 2 tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana menyatakan bahwa diperlukannya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Ada berbagai hambatan dalam komunikasi pemerintah, yaitu: hambatan bahasa, kerangka referensi, kesenjangan status, jarak geografis dan perlindungan diri dari inisiator, dan tekanan lain dari pekerjaan serta komunikasi yang sengaja dibatasi¹⁹.

Hambatan bahasa, penggunaan bahasa yang tidak tepat dan tidak dimengerti oleh penerima pesan dapat menghambat komunikasi. Kerangka acuan, Setiap orang memiliki kerangka acuan yang berbeda, yang dapat mempengaruhi efektifitas pesan yang disampaikan. Kesenjangan status, Hal ini terkait dengan kendala model komunikasi organisasi yang dianut oleh instansi pemerintah. Jarak geografis yang besar antara pemerintah dan warga dapat menghambat komunikasi pemerintah. Pembelaan diri oleh inisiator, Hal ini terkait dengan keinginan penerima pesan untuk menerima pesan tersebut. Tekanan Kerja dapat menyebabkan Anda kehilangan prioritas dalam mengirim dan

menerima pesan dan Pembatasan komunikasi yang disengaja terkait dengan sensor pemerintah untuk mengirim dan menerima pesan.

Salah satu tantangan krusial dalam merespons bencana alam dan bencana akibat ulah manusia adalah komunikasi. Komunikasi selama dan setelah bencana merupakan aspek penting dari inisiatif tanggap dan pemulihan. Komunikasi menyeluruh korban bencana terhubung dengan responden pertama, sistem pendukung dan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, memiliki sistem komunikasi dan informasi yang dapat diandalkan dan dapat diakses juga sangat penting untuk ketahanan masyarakat.

Banyak ahli bencana telah mengakui peningkatan substansial dalam permintaan informasi tentang masyarakat yang terkena dampak dan tidak terpengaruh dalam bencana. Bahkan, tidak dapat diremehkan untuk mengatakan bahwa ada hiruk-pikuk untuk mencari informasi dari korban yang masih hidup, keluarga dan teman-teman mereka, dan pemangku kepentingan yang berkepentingan seperti berbagai lembaga tanggap bencana. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan informasi, seringkali masyarakat mencari informasi dari media massa, orang-orang yang seolah-olah memiliki otoritas, otoritas pemerintah daerah atau anggota masyarakat lainnya

¹⁶ Zainal Abidin Achmad and Juwito, *Sritanjung FM: Mediamorfosis Dari Radioe Lare Using Menjadi Kebanggaan Banyuwangi* (Surabaya: Penerbit Sahaja, 2020).

¹⁷ Syifa Syarifah Alamiyah and Zainal Abidin Achmad, "The Role of Citizen Journalism in Creating Public Sphere in Indonesia," in *ICoDA* (Surabaya: FISIP Universitas Airlangga, 2015), 163.

¹⁸ Nobertus Ribut Santoso et al., "Public Relations Professionals' Communication Strategies in Responding to the COVID-19 Pandemic Based on Gender," *Plaridel* 18, no. 1 (2021): 297.

¹⁹ Herbert A. Simon, Victor A. Thompson, and Donald W. Smithburg, *Public Administration* (United States of America: Routledge, 1991), 15.

sebagai sumber informasi utama selama fase tanggap bencana.

Namun, orang dapat mendebat validitas informasi yang diberikan oleh anggota komunitas. Anggota masyarakat tidak memiliki mekanisme untuk mengumpulkan dan mengotentikasi informasi, sehingga komunikasi semacam itu tidak dapat secara otomatis dikenali sebagai formal. Oleh karena itu, kekosongan informasi ini menimbulkan tuntutan untuk pengorganisasian yang berkelanjutan, pemantauan kredibilitas, dan verifikasi tambahan, sehingga dapat membangun dan menyebarluaskan komunikasi bencana yang andal bagi para pencari informasi. Meskipun demikian, pencarian informasi cenderung memberikan hasil yang positif dengan melibatkan individu lokal sebagai sumber informasi, dibandingkan dengan media massa. Dalam situasi ketika informasi muncul sepotong-sepotong, langka, atau bahkan gagal, komunitas yang terpengaruh cenderung untuk bergabung dan bergabung dengan orang lain sebagai sumber informasi terpercaya mereka.

Metode Penelitian

Metode Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati²⁰. Penelitian kualitatif

merupakan sebuah proses riset dan pemahaman metodologi yang mengkaji suatu fenomena sosial dan masalah manusia²¹. Kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi di masa sekarang.

Artikel ini membahas bagaimana komunikasi pemerintahan dilaksanakan dalam penanggulangan bencana Masamba. Data yang dikumpulkan adalah hasil yang diperoleh melalui pengumpulan data primer melalui wawancara narasumber, yaitu Bapak Basir (Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, Bapak Muslim (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara), Bapak Rifad dan Bapak Manaf (Kepala Keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan). Wawancara berlangsung dalam kurun waktu sebulan, yaitu pada bulan Agustus 2020. Data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai riset terdahulu, serta dari dokumen pemerintah daerah setempat.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif secara deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh sebagai data kuantitatif dan kualitatif dalam kata-kata dan kalimat. Proses analisis data melalui tahapan identifikasi kelompok, penelitian,

²⁰ Steven J. Taylor, Robert Bogdan, and Marjorie L. DeVault, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource* (New Jersey: Wiley, 2016).

²¹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE, 2015).

pengelolaan dan interpretasi data, serta ekstraksi data, reduksi, dan validasi.^{22,23}

Hasil dan Pembahasan

Banjir Bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara tepat pada tanggal 13 Juli 2020 yang terjadi pada Enam Kecamatan yaitu Masamba, Baebunta, Sabbang, Baebunta Selatan, Malangke dan Malangke Barat total korban terdampak 3.627 KK atau 14.483 jiwa, dimana terdapat dua wilayah yang sangat terdampak yaitu kecamatan masamba dan kecamatan baebunta.

Bencana banjir bandang ini menyebabkan Pemerintah Daerah kerja ekstra dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat besar, terdapat 20.447 jiwa atau 6.590 Kepala Keluarga yang terdampak dan memilih mengungsi, korban jiwa meninggal 40 orang. Upaya pemerintah juga tidak hanya berfokus pada penanganan para pengungsi namun juga perbaikan atau pemulihan perumahan penduduk serta fasilitas umum, terdapat 1.454 Rumah rusak berat, 127 rusak sedang dan 2.524 rusak ringan.

Kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan pasca bencana menjadi pekerjaan besar pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat multi sector. Penanggulangan bencana yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat dikatakan sangat responsive, kehadiran pemerintah dan seluruh instansi atau Lembaga turun tangan dalam

penanganan baik sosialnya, infrastrukturnya dan logistiknya. Akan tetapi responsifitas penanganan bencana yang melibatkan multi sector ini dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang memadai agar tercipta penanganan yang terarah dan lebih sederhana.

Komunikasi pemerintahan terlihat kurang efektif terbukti dari banyaknya kebijakan yang diambil oleh Lembaga lain dianulir oleh Lembaga lainnya, sebagai contoh pada pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang diinisiasi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD) Kodam Hasanuddin yang telah selesai 100 unit dari 400 yang direncanakan, harus dihentikan dan tidak terpakai, dikarenakan arahan pemerintah pusat melalui Menteri PMK agar Huntara tersebut dihentikan dan lebih baik dibuatkan Hunian Tetap. Hal ini menunjukkan lemahnya komunikasi lintas sector yang dilakukan sehingga menyebabkan anggaran yang dikeluarkan terkesan terbuang sia-sia, responsifitas yang tinggi tidak cukup dalam penanganan pasca bencana, tetapi juga dibutuhkan komunikasi dan kordinasi lintas sector agar berbagai tindakan dan kebijakan tidak tumpang tindih

Jika melihat apa yang diungkapkan Simon, Smithburg, dan Thomson tentang hambatan-hambatan komunikasi terdapat jarak status dimana ada perbedaan pola organisasi yang berbeda antara pemerintah daerah atai pusat dengan organisasi TNI-AD, ada kerangka referensi yang berbeda

²² Dwi Wahyuningtyas et al., "Local Language Programs in Cultural Radios to Maintain Indonesian National Identity," *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia* 6, no. 1 (June 2021): 49. DOI.10.31947/etnosia.v6i1.11973

²³ Ade Kusuma et al., "A Virtual Ethnography Study: Fandom and Social Impact in Digital Era," *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia* 5, no. 2 (October 2020): 243. DOI:10.31947/etnosia.v5i2.10898

sebagai pondasi dalam mengambil tindakan, personil TNI yang mengambil langkah taktis dan cepat dikarenakan keterlibatan langsung mereka di medan bencana, dengan berbagai aksi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menyebabkan pentingnya mewujudkan adanya hunian yang lebih layak menggantikan rumah korban yang rusak.

Pada prinsipnya pemerintah daerah Luwu utara bersetuju dengan inisiasi dari TNI-AD untuk hunian sementara tersebut dengan menyediakan lahan. Namun ketika pemerintah pusat turun melalui Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menginstruksikan agar Huntera dihentikan dan dilakukan pembangunan hunian tetap atau permanen. Pembahasan lain juga berada pada komunikasi antara pemerintah daerah dengan berbagai Lembaga, organisasi atau paguyuban yang ikut memberi bantuan logistic kepada korban bencana yang tidak dibangun, menyebabkan distribusi logistic tidak merata dan tidak teratur.

Bencana membutuhkan berbagai mode dan intensitas untuk komunikasi. Komunikasi harus terjadi dalam matriks interaksi, harus multifaset, bergerak ke berbagai arah, antara dan di antara lembaga pendukung, lembaga kemanusiaan, responden pertama, staf pendukung, para korban, keluarga dan teman, dan media. Ketika bencana terjadi, biasanya tanpa pemberitahuan, harus ada komunikasi yang memadai dan akurat tentang bencana yang baru saja terjadi. Karena bencana memiliki dampak lokal yang langsung, komunikasi mengenai bencana harus dimulai secara lokal. Ketika bencana terjadi, panggilan

darurat dilakukan ke layanan darurat lokal, seperti polisi, pemadam kebakaran, ambulans, dan otoritas lokal. Informasi dikomunikasikan dalam labirin yang kompleks antara korban, saksi mata, keluarga dan teman, dan pihak berwenang.

Dalam peristiwa bencana yang terjadi secara tiba-tiba, sistem komunikasi dapat menjadi sangat lumpuh, sementara kebutuhan komunikasi menjadi sangat cepat, dan dalam banyak kasus, melampaui kemampuan untuk menghasilkan respons seketika. Dalam situasi seperti itu, komunikasi harus ditangani dengan cara yang diprioritaskan, pengiriman dan penerimaan informasi ke instansi terkait (seperti unit penyelamatan dan keselamatan, instansi terkait bencana dan pemangku kepentingan dan personel lainnya). Proses ini juga harus mengalir dengan intensitas yang sama di dalam lembaga-lembaga tersebut, sehingga informasi dibagikan dengan jelas kepada orang-orang mereka untuk tindakan yang efektif. Tentu saja, jaringan komunikasi yang kompleks ini perlu dikoordinasikan untuk menghindari kekacauan lebih lanjut di daerah bencana. Seperti biasanya, koordinasi terpusat dari informasi atau proses informasi terpusat biasanya sulit untuk berfungsi secara efektif dalam situasi seperti itu.

Pemerintah Daerah Luwu Utara mengakui sulit membangun komunikasi dan kordinasi dengan berbagai Lembaga yang memberikan bantuan logistic masuk ke luwu utara dikarenakan banyak yang ingin secara mandiri menyalurkan bantuannya tanpa harus menitipkan kepada pemerintah daerah, namun untuk Lembaga

yang berskala besar seperti pemerintah daerah lain dan organisasi masyarakat besar tetap dilakukan komunikasi dan kordinasi agar bantuan dapat dikelola oleh pemerintah daerah Luwu utara. Mengingat kondisi bantuan menumpuk dilokasi pengungsian sehingga banyak yang terbuang seperti pakaian dan air mineral, tujuan pemerintah daerah Luwu utara untuk mengelola berbagai bantuan tidak lain untuk pemeratakan distribusi dan waktu distribusi sesuai dengan kebutuhan korban.

Komunikasi pemerintahan harus dibangun secara harmonis dengan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Tidak hanya menyajikan informasi melalui website namun juga komunikasi langsung dan pertukaran pendapat dengan publik. Petugas informasi publik bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan situasi di berbagai platform, termasuk tidak hanya media sosial tetapi outlet lain seperti radio dan selebaran. Dan mereka harus mengendalikan desas-desus dan informasi yang salah, yang menyebar dengan cepat di media sosial. Selama banjir bandang Masamba, sebagian besar aparat pemerintah dilarang menggunakan kembali informasi yang dikumpulkan orang banyak karena kredibilitasnya tidak pasti.

Kebutuhan akan informasi tidak hanya dibutuhkan oleh korban bencana tapi juga seluruh masyarakat, dikarenakan akan menjadi bahan dan dasar dalam melakukan

tindakan yang dibutuhkan, untuk itu terdapat Forum Masyarakat Korban Banjir yang terbentuk, melakukan aksi demonstrasi dengan berbagai tuntutan dan meminta agar dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Bupati Kabupaten Luwu Utara. Sehingga Bupati sebagai pemerintah daerah dan Masyarakat terjalin komunikasi langsung akibatnya berbagai tuntutan masyarakat dapat terjawab, hal tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi langsung yang dilakukan dalam situasi-situasi darurat bencana.

Situasi diatas merupakan pentingnya mewujudkan komunikasi yang baik dimasa pemulihan. Mewujudkan pemulihan juga menjadi poin penting bagi pemerintah, untuk itu sangat dibutuhkan komunikasi efektif dimasa pemulihan sehingga kebutuhan masyarakat untuk mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemulihan tersebut dapat dicapai. Sam

Terdapat tiga dasar aturan yang mendasari komunikasi yang efektif dalam pemulihan, yaitu: informasi harus relevan, jelas, dan tepat sasaran²⁴. Relevan artinya masyarakat yang terkena dampak sering kewalahan oleh sejumlah besar informasi pada saat mereka berada di bawah tekanan dan tidak dapat menyimpan informasi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua informasi yang dikomunikasikan kepada masyarakat yang terkena dampak adalah relevan.

Informasi yang jelas artinya

²⁴ Lisa Robert, *Communication during Disaster Recovery, Communication during Disaster Recovery* (USA, 2020).

mengedepankan isi komunikasi yang jujur, transparan sebagaimana komunikasi yang jamak digunakan dalam public relations²⁵. Pada kondisi bencana, isi komunikasi yang jelas dan mudah dipahami, dapat memberdayakan masyarakat untuk memulihkan diri. Jika informasi teknis perlu dikomunikasikan, sedapat mungkin disampaikan menggunakan bahasa non-teknis. Selain itu, penting untuk memastikan informasi diberikan dalam format yang dapat diakses oleh orang-orang dengan gangguan sensorik, atau yang mungkin berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang beragam. Dengan demikian, produk komunikasi mungkin perlu diproduksi dalam bahasa yang berbeda, dan penerjemah bahasa isyarat mungkin diperlukan pada pertemuan komunitas.

Tepat sasaran artinya metode komunikasi yang digunakan harus disesuaikan dengan audiens. Oleh karena itu, penting untuk memahami budaya komunikasi (yaitu, kepercayaan, bahasa, dan sistem nilai yang memengaruhi dan mendorong komunikasi dan perilaku terkait) dari komunitas yang menjadi sasaran, serta cara terbaik untuk menjangkau mereka.

Komitmen pemimpin atau kepala daerah dalam mengkomunikasikan secara harmonis masa krisis penanganan bencana sangat krusial, tampilnya pemimpin

ditengah masa krisis untuk senantiasa mengkomunikasikan perkembangan dengan tepat akan meminimalisir kepanikan masyarakat. Pada kondisi inilah diperlukan komunikasi pemerintahan yang tidak hanya bersifat konvensional dan tidak memberi kontribusi dalam penanganan pasca bencana, diperlukan metode-metode yang lebih variative dan inovatif agar komunikasi yang dibangun menjadi lebih hangat dan tidak membuat gaduh.

Kualitas kepemimpinan ditunjukkan dengan kemampuannya mengatasi perubahan, menentukan arah pergerakan dan menjadi inspirasi, meskipun diketahui hambatan dalam menuju perubahan senantiasa muncul. Kepemimpinan sering dianggap oleh organisasi sebagai penentu paling penting dari keberhasilan atau kegagalan secara keseluruhan²⁶. Menurut²⁷ pemimpin yang baik menyediakan organisasi dengan visi dan arah, menciptakan keteraturan dari kekacauan.

Selama krisis, pemimpin sebuah organisasi menjadi katalis untuk sukses atau kegagalan pencapaian. Krisis adalah masalah ketidakpastian dan ketakutan. Kepemimpinan adalah pandangan ke depan, visi, fleksibilitas dan pemberdayaan. Inilah sebabnya mengapa kepemimpinan dalam situasi krisis adalah kemampuan untuk menciptakan visi dan cara perbaikan.

²⁵ Nobertus Ribut Santoso et al., "Public Relations Professionals' Communication Strategies in Responding to the COVID-19 Pandemic Based on Gender," *Plaridel* 18, no. 1 (June 2021): 295–316, <https://doi.org/10.52518/2021.18.1-08saderac>.

²⁶ Bernard M Bass, "Two Decades of Research and Development in Transformational

Leadership," *European Journal of Work and Organizational Psychology* 8, no. 1 (March 1999): 15, <https://doi.org/10.1080/135943299398410>.

²⁷ James E. Grunig and Larissa A. Grunig, "Models of Public Relations and Communication," in *Excellence in Public Relations and Communication Management* (USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1992).

Bupati Luwu utara yaitu Indah Putri Indriani menunjukkan komitmen yang kuat dan kemampuan yang cakap dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana, sekalipun beliau menjadi korban namun tidak menghalangi kehadirannya ditengah masyarakat membangun komunikasi tanpa jarak dengan masyarakat, begitupun upayanya melakukan kordinasi dan komunikasi kepada pemerintah pusat dalam mengupayakan percepatan berbagai bantuan untuk menghidupkan kembali kondisi masyarakat Luwu Utara, berbagai distorsi komunikasi baik yang disebabkan *overload information* maupun berita palsu (hoax) mampu dikendalikan dengan keterlibatan aktifnya dalam komunikasi dengan menyederhanakan bahasa.

Pemerintah harus memastikan bahwa semua informasi dari pemerintah diberikan kepada semua orang setiap saat. Perlu benar-benar menyadari kebutuhan untuk berkomunikasi secara efektif baik untuk mempengaruhi opini publik dan mempertahankan legitimasinya. Dalam upaya ini, pemerintah juga harus menjajaki pendekatan komunikasi dua arah karena ini akan memastikan keterlibatan yang lebih dekat. Kemampuan untuk terlibat dalam komunikasi dua arah dengan warga negara melibatkan serangkaian struktur, proses, dan praktik yang saling terkait, yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk berkomunikasi secara efektif dengan publik.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan informasi kepada publik secara terkoordinasi agar tidak terjadi polemik dan kontroversi.

Mengingat lingkungan informasi dan komunikasi yang berubah dengan cepat di seluruh dunia, penguatan kapasitas komunikasi pemerintah harus memanfaatkan konvergensi yang ada dan potensial dalam ruang komunikasi dan campuran media suatu negara. Teknologi informasi dan komunikasi baru dapat membantu meningkatkan upaya pemerintah untuk berkomunikasi secara proaktif dengan publik. Dalam merencanakan komunikasi pesan pemerintah, kombinasi teknologi informasi dan komunikasi baru dan tradisional dapat memberikan peluang lompatan dalam beberapa konteks.

Kesimpulan

Pada Hakikatnya komunikasi pakan hadir dimanapun manusia berada, terlebih lagi komunikasi pada sector pemerintahan, demi untuk kelancaran dan suksesnya kebijakan dilaksanakan maka penting untuk membangun komunikasi pemerintahan yang efektif tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada lintas sector instansi. Terlebih lagi dalam situasi bencana, maka komunikasi pemerintahan sangat dibutuhkan terbangun secara efektif agar penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan tepat dan lebih sederhana, Komunikasi pemerintahan yang terjadi pada bencana Banjir bandang masamba Kabupaten Luwu utara menjadi refleksi tentang lemahnya komunikasi pemerinthan yang dibangun, hal tersebut tentu dapat disebabkan karena ketidaksiapan berbagai pihak atas peristiwa yang secara tiba-tiba ini.

Berbagai hambatan yang terjadi

dalam membangun komunikasi pemerintahan menyebabkan berbagai kebijakan saling mengeliminasi satu dengan yang lainnya, yang menjadikannya lebih kompleks keterlibatan berbagai Lembaga, organisasi dan paguyuban dalam upaya penanganan pasca bencana membuat komunikasi dan kordinasi semakin sulit. Terbukti dari beberapa persoalan seperti pembangunan hunian sementara oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD) Kodam Hasanuddin, harus dianulir sedangkan telah terbangun 100 unit dari 400 yang direncanakan, karena pemerintah pusat menginstruksikan untuk dibangun hunian tetap saja.

Adanya kerangka referensi yang berbeda antara TNI-AD dan Pemerintah Pusat tentu menjadi salah satu sebab, dimana personil TNI yang langsung turun di medan bencana memberi bantuan, merasa perlu untuk mengambil langkah taktis membuat hunian sementara bagi pengungsi yang kehilangan hunian, sedangkan pemerintah pusat memandang hal tersebut membuang waktu dan tenaga karena sebaiknya langsung dibuatkan hunian tetap. Begitupun komunikasi dan kordinasi dalam distribusi logistic yang tidak merata dikarenakan pemerintah daerah menemui kesulitan dalam membangun komunikasi dengan berbagai donator yang masuk ke luwu utara.

Peran kepemimpinan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani pada masa krisis menjadi hal yang penting sekali untuk hadir sebagai komunikator yang efektif agar tidak timbul kepanikan masyarakat, Bupati Luwu utara menyadari hal ini, ketika ada demonstrasi yang menuntut

percepatan penanganan bencana maka beliau langsung menemui demonstran dan menjawab segala tuntutan. Komunikasi pemerintahan menjadi jalan tol bagi kesuksesan sebuah kebijakan terlebih dalam situasi bencana, untuk itu harus dibangun secara efektif kepada seluruh elemen masyarakat dan juga antara instansi pemerintahan, Komunikasi lebih dari sekedar media perantara, Komunikasi pemerintahan harus didasarkan pada program dan strategi komunikasi yang terpadu.

Daftar Pustaka

- Achmad, Zainal Abidin, Rachmah Ida, Mustain Mustain, and Ronald Lukens-Bull. "The Synergy of Islamic Da'wah and Madura Culture Programmes on Nada FM Sumenep Radio, Indonesia." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 37, no. 2 (2021): 111–129. <https://ejournal.ukm.my/mjc/article/view/37323/12023>.
- Achmad, Zainal Abidin, Juwito Juwito, and Muhammad Saud. "The Local Creative Ads on Sritanjung FM to Increase Financial Revenue During COVID-19 Pandemic." *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2020): 135–146. DOI: <http://dx.doi.org/10.30813/bricolage.v6i02.2229>
- Alamiyah, Syifa Syarifah, and Zainal Abidin Achmad. "The Role of Citizen Journalism in Creating Public Sphere in Indonesia." In *International Conference on Democracy and Accountability ICoDA 2015*, 162–167, 2015. <https://www.researchgate.net/publication/326485984>.

- Arif, Lukman. "Mitigasi Bencana Gempa Di Kota Surabaya (Kajian Tentang Upaya Antisipatif Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mengurangi Resiko Bencana)." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 1 (2020): 86–100. <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.2048>
- Bass, Bernard M. "Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership." *European Journal of Work and Organizational Psychology* 8, no. 1 (March 1999): 9–32. <https://doi.org/10.1080/135943299398410>.
- Canel, María José, and Karen Sanders. *Government Communication: An Emerging Field in Political Communication Research in The SAGE Handbook of Political Communication*. London: SAGE Publications Ltd, 2012.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Los Angeles: SAGE, 2015.
- Dance, Frank. "The 'Concept' of Communication." *Journal of Communication* 20, no. 2 (2006).
- Davis, Laura N. Medford, and G. Bobby Kapur. "Preparing for Effective Communications during Disasters: Lessons from a World Health Organization Quality Improvement Project." *International Journal of Emergency Medicine* 7, no. 1 (March 2014): 1–7. DOI:10.1186/1865-1380-7-15.
- Dewi, Fitriana Utami. "Urgensi Komunikasi Cerdas Dalam Birokrasi Publik." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (April 10, 2011): 109–124. Accessed July 29, 2021. <http://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/JIK/article/view/100>.
- Grunig, James E., and Larissa A. Grunig. "Models of Public Relations and Communication." In *Excellence in Public Relations and Communication Management*. USA: Lawrence Erlbaum Associates, 1992.
- Haddow, G.D., and Kim S. Haddow. *Disaster Communication in A Changing Media World*. United Kingdom: Butterworth–Heinemann, 2008.
- Hasan, Erlina. *Komunikasi Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama, 2010.
- Kaskoyo, Hari, Abrar Juhar Mohammed, and Makoto Inoue. "Impact of Community Forest Program in Protection Forest on Livelihood Outcomes: A Case Study of Lampung Province, Indonesia." *Journal of Sustainable Forestry* 36, no. 3 (April 2017): 250–263. <https://waseda.pure.elsevier.com/en/publications/impact-of-community-forest-program-in-protection-forest-on-liveli>.
- Kusuma, Ade, Adiasri Putri Purbantina, Vina Nahdiyah, and Ucik Uswatun Khasanah. "A Virtual Ethnography Study: Fandom and Social Impact in Digital Era." *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia* 5, no. 2 (October 2020): 238–251. DOI:10.31947/etnosia.v5i2.10898.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Netshitenzhe, Joel. *The Government Communicators' Handbook*. South Africa: Government Communications and Information System, 2014.
- Nugroho, Agung. "Pengembangan Model Pembelajaran Mitigasi Bencana Gunung Meletus Di Sekolah Dasar

- Di Lereng Gunung Slamet.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat E-ISSN* 1, no. 2 (April 2018): 131-137. <https://doi.org/10.36341/jpm.v1i2.413>.
- Panorama, Anggun Dwi, Nala Nourma Nastiti, and Fika Aulia Anfasa. “Kerja Sama Pengurangan Risiko Bencana Indonesia Australia 2016-2018.” *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (Februari 2021): 223–243. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.290>.
- Rachmawati, Turniningtyas Ayu. “Comparison Studies on Integrating of Disaster Risk Reduction (DRR) in Spatial Planning Systems in Indonesia, Japan, and European Countries.” *Penanggulangan bencana* 4–1, no. Perubahan iklim (2013): 13–24. [internal-pdf://0.217.117.156/DRR & NELAYAN.pdf](https://doi.org/10.217.117.156/DRR&NELAYAN.pdf).
- Robert, Lisa. *Communication during Disaster Recovery. Communication during Disaster Recovery*. USA, 2020.
- Rustinsyah, Rustinsyah, Ratna Azis Prasetyo, and Muhammad Adib. “Social Capital for Flood Disaster Management: Case Study of Flooding in a Village of Bengawan Solo Riverbank, Tuban, East Java Province.” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 52, no. November 2020 (2021): 101963. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.101963>.
- Santoso, Nobertus Ribut, Emanuela Agra, Sarika Kurnia, Heidy Arviani, and Zainal Abidin Achmad. “Public Relations Professionals’ Communication Strategies in Responding to the COVID-19 Pandemic Based on Gender.” *Plaridel* 18, no. 1 (2021): 295–316. <https://doi.org/10.52518/2021.18.1-08saderac>.
- Simon, Herbert A., Victor A. Thompson, and Donald W. Smithburg. *Public Administration*. United States of America: Routledge, 1991.
- Wahyuningtyas, Dwi, Ade Kusuma, Roziana Febrianita, and Zainal Abidin Achmad. “Local Language Programs in Cultural Radios to Maintain Indonesian National Identity.” *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia* 6, no. 1 (June 2021): 47–65. DOI.10.31947/etnosia.v6i1.11973.